

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang selalu dihadapi pemerintah dari tahun ke tahun, Kemiskinan merupakan realitas dan sekaligus menjadi masalah sosial yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang butuh penanganan dan program khusus. Masalah Kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kemiskinan yang terjadi serta tingkat kesulitan mengatasinya. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban.([http://www.kompasiana.com/kuncoromm/kemiskinan-sebagai-sebuah-tantangan\\_551714df81331188669de168](http://www.kompasiana.com/kuncoromm/kemiskinan-sebagai-sebuah-tantangan_551714df81331188669de168) diakses pada 20 April 2017 pukul 19:15 WIB)

Kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Kerena sifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (social well-being). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memelurkan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur Kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah.

( Awan, Eds:1995:31) Subtansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi terhadap sumber-sumber pemenuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Dalam syariat islam, ukuran kemiskinan adalah kurang dari hisaf zakat. Apabila seseorang berada dibawah ukuran satu hisaf zakat maka seseorang tersebut sulit memenuhi kebutuhan dasar.

Banyaknya penduduk Indonesia dengan jumlah populasi sekitar 255 juta penduduk, Indonesia merupakan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Sehingga populasi angka kemiskinan semakin meningkat karena padatnya jumlah penduduk.(<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67> diakses pada 20 April 2017 pukul 21:00 WIB)

Dalam menangani setiap masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program serta stimulus guna mengatasi kemiskinan. Program khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang didirikan sejak tahun 2007.

Adapun upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan pemerintah, salah satunya dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 124/2001 jo Keppres RI No-8/2A02 io Keppres RI No. 34/2002. Komite ini melibatkan berbagai aktor, yaitu: akademisi, LSM, pelaku usaha, birokrasi daerah, onnas/ orsospol, dan lembaga keuangan bank dan non bank. KPK dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan yang didasarkan atas pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia Program Keluarga Harapan pertama kali di implementasikan pada tahun 2007 dengan uji coba di tujuh provinsi (Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara dan Gorontalo).

([www.Cermati.com/artikel/amp/program-keluarga-harapan-apa-manfaat-yang-ditawarkan](http://www.Cermati.com/artikel/amp/program-keluarga-harapan-apa-manfaat-yang-ditawarkan) diakses pada 21 April 2017 pukul 23:22 WIB) Sedangkan untuk DIY, termasuk Kabupaten Bantul, PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2008 berbarengan dengan Aceh, Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (Nainggolan, 2012).

Dalam menentaskan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas serta mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan ber usaha masyarakat miskin.
  - b. Memperkuat tugas masyarakat miskin untuk mengambil keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
  - c. Mewujudkan kondisi serta lingkungan ekonomi, politik dan sosial memungkinkan warga miskin mendapatkan kesempatan yang besar dalam pemenuhan hak-hak dasar dan meningkatkan taraf hidup;
  - d. Terciptanya rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin;
- dan

- e. Menurunkan angka masyarakat miskin.

(<http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c5b109e7e290b0ac313330343434.html> diakses pada 25 April 2017 pukul 09:09 WIB)

Direktorat Jaminan Sosial (2008:17) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan maupun pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 akan mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini serupa dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) di negara lain atau bantuan tunai bersyarat. Program ini tidak dimaksudkan untuk kelanjutan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) tetapi diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin serta mempertahankan daya belinya pada saat Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Maksud dari PKH merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai Kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).

Direktorat Jaminan Sosial (2008:18) dalam PKH bantuan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk menyekolahkan anak mereka, melakukan pemeriksaan kesehatan dibidang

pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan untuk ibu hamil. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait tingkat pendidikan dan kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Direktorat Jaminan Sosial (2013:19) Program Keluarga Harapan diperuntukkan untuk Keluarga Sangat Miskin. Data keluarga yang menjadi peserta PKH didapat dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria dalam program berikut, yaitu: memiliki ibu hamil/ nifas/ anak balita, memiliki anak usia 5 sampai 7 tahun yang belum terdaftar di pendidikan dasar (anak pra sekolah), anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7 sampai 12 tahun, anak SLTP/ MTs/ Paket B/ SMLB (Usia 12-15), anak 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dalam hal ini juga termasuk anak dengan disabilitas.

Adapun Landasan Hukum pemberian Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).  
(<http://www.idsalim.com/2016/08/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-pkh.html> diakses pada 29 April 2017 pukul 13:12 WIB)

Disamping masalah kemiskinan masih menjadi persoalan serius didalam implementasi PKH masih ditemukan berbagai permasalahan. BPK RI masih menemukan permasalahan dalam pelaksanaan PKH Tahun 2012, antara lain komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung PKH masih kurang, proses validasi tidak sesuai ketentuan sehingga hasil validasi tidak akurat, proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal, tidak ada keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kemensos sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif dan monitoring rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum.(<http://www.bpk.go.id/news/efektivitas-program-keluarga-harapan> diakses pada 22 Agustus 2017 pukul 16:23 WIB)

Di Bantul penerimaan Program Keluarga Harapan masing kurang valid. Pemerintah Kabupaten Bantul memperkirakan terdapat 3.000 data yang tidak valid

dan perlu di verifikasi ulang agar penerima Program Keluarga Harapan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengantongi 21.000 penerima Program Keluarga Harapan namun data yang didapatkan dari pemerintah pusat tersebut banyak yang tidak valid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Bapak Mahmudi “dari jumlah 21.000, dia memperkirakan terdapat 2.000 sampai 3.000 data yang tidak valid. Dia mengatakan dari data 21.000 tersebut banyak yang sudah meninggal, namanya tidak ada, dan ada pula yang dobel, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Data yang tidak valid tersebut menurutnya karena merupakan data lama dari pemerintah pusat.(<http://www.harianjogja.com/baca/2016/10/10/bantuan-warga-miskin-3-000-data-program-keluarga-harapan-di-bantul-tidak-valid-759612> diakses pada 22 Agustus 2017 pukul 16:34 WIB)

Banyaknya jumlah PKH yang harus diverifikasi tersebut menurut dia karena Pemerintah Pusat membatasi kriteria bagi penerima PKH. Selain itu mereka yang mendapatkan PKH adalah keluarga miskin yang dalam keadaan hamil, memiliki anak bayi, balita, TK, SD, SMP, SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana “ KINERJA DINAS SOSIAL DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016” terkait kinerja Dinas Sosial yang diberikan kepada masyarakat sehingga kinerja dapat berjalan secara optimal.

## **B . Rumusan Masalah**

1. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul tahun 2016.

## **C .Tujuan penelitian**

- a. Berdasarkan dari rumusan masalahnya yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat mengubah wawasan pengetahuan pembaca tentang pelaksanaan program yang mengikutsertakan masyarakat bagaimana pelaksanaan program dan faktor – faktor yang ada di program itu.

2. Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan Dinas Sosial dan pihak yang terkait serta mengikutsertakan masyarakat dalam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk masyarakat Kabupaten Bantul yaitu sebagai sumber pengetahuan bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Mengacu pada berbagai literature pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini, literature yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
Muhammad Rafiudin	Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak tahun 2016.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak banyak mengalami masalah dan belum ada Implementasi secara baik. Sosialisasinya belum sepenuhnya menyeluruh, sehingga masih kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pendataan peserta penerima

		<p>Program Keluarga Harapan belum menyeluruh, banyak yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan. Penggunaan dana Program Keluarga Harapan dari RTSM kerap di pergunakan untuk di luar dari ketentuan. Untuk jangka Panjang belum bisa merubah pola pikir dan prilaku RTSM secara signifikan.</p>
<p>Lailia Priyantiningtiyas</p>	<p>Evaluasi Kinerja Pendamping PKH Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2013.</p>	<p>Dari hasil penelitian dilapangan tentang Evaluasi Kinerja Pendamping PKH di Kecamatan Banyuputih Tahun 2013 dengan menggunakan lima indicator yang ada, maka secara keseluruhan kinerja pendamping PKH Keamatan Banyuputih Tahun 2013 dapat dikatakan bagus. Hal ini dilihat dari indicator masukan , maka kinerja pendamping PKH di Kecamatan Banyuputih ini sesuai dengan ketentuan yang ada karena di</p>

		<p>Kecamatan Banyuputih ini terdapat 6 pendamping di mana 1 pendamping bertugas untuk mendampingi penerima PKH dalam satu desa dan setiap Kecamatan pasti ada coordinator pendamping Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi kinerja pendamping PKH di kecamatan tersebut. Dilihat dari indicator keluaran, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pendamping PKH di Kecamatan Banyuputih ini sudah memenuhi aspek keluaran karena dengan adanya program keluarga harapan di Kecamatan Banyuputih ini, maka tujuan utama PKH untuk mengurangi kemiskinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin dalam bidang kesehatan dan Pendidikan untuk anak</p>
--	--	--

		<p>usia sekolah, ibu hamil, ibu nifas, dan balita tercapai.</p> <p>Dilihat dari indicator hasil, maka efek langsung yang dapat dirasakan masyarakat penerima PKH di Kecamatan Banyuputih adalah meningkatnya kesadaran dan berubahnya pola pikir masyarakat penerima dana PKH dalam bidang kesehatan dan Pendidikan. Dilihat dari indicator manfaat, maka tujuan akhir dari PKH untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada bidang kesehatan dan Pendidikan sudah tercapai yang terlihat dai menurunnya angka anak putus sekolah dan kesadaran ibu hamil dan ibu yang punya anak balita untuk ke fasilitas kesehatan setiap bulannya. Indicator manfaat ini juga dapat dilihat dari angka partisipasi kasar masyarakat Kecamatan Banyuputih</p>
--	--	---

		<p>dalam PKH. Dilihat dari indicator dampak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PKH yang diukur mulai dari indicator masukan, keluaran, hasil, dan manfaat berpengaruh positif bagi sasaran program ini, yakni bagi anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hal ini terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat Kecamatan Banyuputih yang menerima dana PKH karena dulu masyarakat tidak memperhatikan Pendidikan dan kesehatan akibat sulitnya kehidupan ekonomi.</p> <p>Dari kesimpulan yang ada, maka ada tiga saran yang dikemukakan penulis berkaitan dengan penelitian ini. Saran pertama bagi pendamping PKH di Kecamatan Banyuputih yang disarankan harus lebih ketat lagi mengawasi pelaksanaan PKH karena</p>
--	--	--

		<p>dikhawatirkan banyak penerima PKH yang sebenarnya tidak layak mendapat bantuan itu. Saran kedua adalah, evaluasi kinerja pendamping PKH di Kecamatan Banyuputih harus dilakukan secara rutin dan berkala oleh koordinatornya agar tujuan pelaksanaan PKH di Kecamatan Banyuputih tercapai. Dan saran yang terakhir bagi dinas sosial dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang diharapkan dapat berkoordinasi demi tercapainya tujuan akhir PKH, yakni pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada bidang kesehatan dan Pendidikan.</p>
Sekar Ayu Palupi	<p>Hubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan Peningkatan Tingkat Pendidikan Di Desa Tanjung</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat hubungan implementasi program keluarga harapan dinas sosial dengan tingkat pendidikan di desa</p>

	<p>Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.</p>	<p>Tanjung kesuma kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan maka semakin tinggi peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma.</p>
<p>Astri Sani dan Utami Dewi</p>	<p>Kinerja Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dalam optimalisasi Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kinerja UPPKH dalam optimalisasi PKH di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori baik, dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada yaitu; 1) Produktivitas, UPPKH mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan. (2) pelayanan ramah, tanggap, dan jelas dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. (3) respon yang cepat pada masalah yang terjadi di masyarakat terkait kasus PKH. (4) adanya SOP sebagai acuan kinerja</p>

		<p>UPPKH. (5) Bentuk tanggung jawab telah diberikan UPPKH dengan baik pada <i>stakeholder</i> maupun masyarakat. Tersedianya fasilitas yang sudah memadai dan dukungan kebijakan serta pedoman kerja yang ada menjadi pendukung kinerja UPPKH dalam optimalisasi PKH di Kota Yogyakarta. Namun sejauh ini masih adanya kendala dari segi internal maupun eksternal yang menghambat kinerja UPPKH dalam optimalisasi PKH di Kota Yogyakarta.</p>
Nanda Nadilia Putri	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi PKH di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah berjalan sebagai mana mestinya walaupun secara umum masih ada masyarakat yang belum mentas dari segi bantuan. Hal ini, perlu diadakan pembinaan kembali setelah peserta PKH mentas dari</p>

		<p>bantuan tersebut. Saran kepada UPPKH supaya mengoptimalkan pendamping, memaksimalkan fungsi serta tugas pelaksana kebijakan, memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan kepada KSM, serta memberikan <i>mindset</i> pada peserta ataupun non peserta akan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak.</p>
<p>Dedy utomo, Abdul Hakim dan Heru Ribawanto</p>	<p>Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri.</p>	<p>Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kecamatan Purwoasri ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan bukti</p>

		nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.
Herman Susanto	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, pendamping untuk pencairan bantuan, pemutakhiran data, serta verifikasi komitmen pada peserta. Hanya saja masih ada kekurangan dari PKH diakibatkan masih banyak RTSM yang mempunyai rasa ketergantungan dari bantuan PKH. Selanjutnya pada proses pemutakhiran data harus ditingkatkan lagi karena proses ini sangat berkaitan dengan nominal yang akan diberikan saat pencairan nanti. Selanjutnya, UPPKH Kecamatan

		Kebayoran Lama perlu meningkatkan kinerja antara lembaga internal dengan eksternal karena program PKH ini pada dasarnya program lintas antar Lembaga.
Muhtadin	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan Desa Jatisawi Lor Kecamatan Jatibaran Kabupaten Indramayu.	Hasil temuan lapangan menunjukkan kurangnya pengawasan yang belum maksimal dari keluarga baik ibu maupun ayah, serta minimnya motivasi orang tua terhadap anaknya untuk pergi ke sekolah, Dalam pelaksanaan PKH bidang kesehatan belum semua peserta program keluarga harapan mendapatkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena periode updating data kemiskinan dari BPS tahun 2011.
Surahmawati	Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Pontiana Timur.	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Pendamping PKH di Kecamatan pontianak Timur masih belum optimal

		<p>dalam pelaksanaan tugas serta tanggung Jawab dan Tingkat kehadiran yang masih kurang di Unit Pelaksana PKH. Rekomendasi dari peneliti adalah perlunya peningkatan Kinerja. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan agar kinerja pendamping PKH di daerah Kecamatan Pontianak Timur dapat berjalan lebih optimal lagi. Pelaksanaan Program keluarga Harapan di Kecamatan Pontianak Timur mencakup 3 hal yaitu tugas persiapan, tugas rutin dan tanggung jawab. Pelaksanaan PKH yang berkaitan dengan kesungguhan, komitmen dan tanggung jawab pendamping terhadap masyarakat penerima manfaat program.</p>
Muhammad Nasir	<p>Pengaruh dan Efektifitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan dana bantuan PKH yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan</p>

	<p>Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.</p>	<p>di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie adalah sudah dilakukan dengan sangat efektif, dimana rata-rata tingkat efektifitas pemberian bantuan PKH dari tahun 2008 sampai 2013 mencapai 95,58 persen. Bantuan PKH mampu mempengaruhi partisipasi pendidikan anak RTSM di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie mencapai 96,8 persen dan sisanya sebesar 3,2 persen di pengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. Pemberian bantuan PKH hendaknya tepat sasaran dan benar-benar ditujukan untuk meningkatkan pendidikan anak. Hal ini penting, karena bantuan tersebut sifatnya hanya sementara dan terfokus pada pemutusan rantai kemiskinan.</p>
--	--	---

## **F. Kerangka Dasar Teori**

Dalam penelitian ini teori merupakan suatu hak yang akan digunakan untuk mendukung dan memecahkan masalah-masalah yang akan muncul. Sebelum peneliti mengemukakan teori-teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini ada baiknya penyusun mendefinisikan teori terlebih dahulu. Masri Singaribun dan Sofian Efendi (1985:18) menyatakan: “ teori adalah saran pokok untuk mengungkapkan hubungan sistematis antar fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti”.

Menurut Kontjaraningrat (1991:19) “ teori sebagai serangkaian asumsi konsep, kontrak definisi proporsi dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.

### **1. Kinerja**

#### **A. Pengertian**

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67) kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Stolovitch and Keep (1992) kinerja didefinisikan sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Menurut Griffin (1987), kinerja adalah salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Menurut Hersey and Blanchard (1993) kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan.

Demi penyelesaian tugas atau pekerjaan seseorang harus mempunyai derajat kesediaan dan kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidak cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa adanya pemahaman yang mendalam terkait apa yang akan dikerjakan serta bagaimana mengerjakannya.

Menurut Donnelly, Gibson and Ivancevich(1987) kinerja mengarah pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas dan mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kinerja dinyatakan sukses apabila tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Schermerhorn, Hunt and Osborn (1991) kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan. Menurut Hasibuan, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ilyas (2005:55) kinerja adalah penampilan, hasil karya personil baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memagku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51) beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktifitas kerja:

- Sikap aparat, dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kesediaan dan inisiatif para pegawai dalam bekerja secara efektif dan efisien. Misalnya bagaimana para pegawai mengelola dokumen dengan baik sehingga apabila saat dokumen di perlukan dengan mudah ditemukan.
- Kemampuan, diharapkan aparatur mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam pekerjaannya. Misal dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Maka pegawai diharapkan mampu melaksanakan tugas tersebut adalah pegawai yang memiliki dasar pendidikan administrasi kependudukan.
- Semangat kerja, diartikan sebagai sikap antusiasme pegawai dalam menjalankan tugas. Sikap ini dilihat dari komitmen dan kemauan tinggi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

2. Kualitas layanan

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan publik. Menurut Dwiyanto, dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan tingkat kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan

masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah, misalnya dapat di peroleh dari media massa atau diskusi publik.

### 3. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud disini adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang dibutuhkan dengan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksud sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah dapat dilihat dari ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

### 4. Responsibilitas

Poin penting responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun yang implisit, Levine dalam Dwiyanto. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Disini dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah agar dapat memberikan layanan publik sesuai aspirasi masyarakat namun pada pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

#### 5. Akuntabilitas

Pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat diharapkan dapat terus secara konsisten memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan norma-norma dalam masyarakat. Dalam konteks ini akuntabilitas dapat dipahami bagaimana organisasi publik dapat memberikan layanan publik dengan konsisten sesuai kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian kinerja diartikan sebagai kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh sekelompok atau individu untuk mencapai suatu tujuan serta hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Dapat dilihat dari aspek seperti berikut :

##### a. Aspek Produktivitas

Aspek ini berhubungan dengan perbandingan antara masukan dan pengeluaran dalam suatu organisasi . Apabila pengeluaran atau

penghasilannya lebih besar daripada masukan atau ongkosnya, maka kondisi ini disebut efisiensi atau produktivitas tinggi, apabila keluaran lebih rendah dari masukan, organisasi tersebut tidak efisien.

b. Pengukuran kinerja organisasi

Pengukuran kinerja menurut Simamora (2004:500) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut Dharma (2004:355) pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a). Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus di capai.
- b). Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya).
- c). Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

**B. Faktor yang mempengaruhi kinerja**

Menurut Griffin dalam Sule dan saefullah (2005:235) kinerja terbagi oleh 3 faktor, yaitu:

1. Kemampuan

Kemampuan merupakan kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaannya. Kemampuan SDM berkaitan dengan latar belakangnya seperti pendidikan serta kemampuan soft skill lainnya.

## 2. Motivasi

Motivasi merupakan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Dalam suatu organisasi atau instansi motivasi sangat di butuhkan untuk mempengaruhi kinerja para karyawan/ pegawai. Motivasi yaitu memberikan dorongan kepada pegawai untuk melakukan sebuah pekerjaan demi tercapainya tujuan.

## 3. Lingkungan pekerjaan

Lingkungan pekerjaan merupakan keadaan dimana sumber daya atau situasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

## 2. Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang sangat luas dalam sistem maupun prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (<http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/> diakses pada 11 Juli 2017 pukul 21:38 WIB)

Peran pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka menjalankan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu menjalankan seluruh urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima semua wewenang pemerintahan dari Pemerintah untuk Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua tugas dari Pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa guna melaksanakan tugasnya. (<http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/> diakses pada 11 Juli 2017 pukul 21:38 WIB)

Menurut Suhady dalam Riawan pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat di suatu Negara dan Kota. Pemerintahan diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan, Negara bagian atau kota. Pengertian 17 pemerintah dapat dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan

yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (<http://e-journal.uajy.ac.id/358/3/2MIH01330.pdf> diakses pada 21 Juni 2017 pukul 19:19 WIB)

Tjahja Supriatna yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur Pemerintah Daerah:

- a. Pemerintah Daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

### **3. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Suharno, 2013:11) dalam Budi Winarno yang menyatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

Kemudian definisi lain disampaikan Pressman dan Widavsky (Winarno, 2002:7) sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat

yang bias. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta, hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintahan.

Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014:19) Sedangkan implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang sifatnya abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan sudah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014:19) Mazmanian dan Sabatier menjelaskan konsep implementasi kebijakan adalah berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha administrasi maupun juga usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa.

Howleyt dan Ramesh (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014:20) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *the process whereby programs or policies are carried out; it donates the translation of plans into practice* (implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau

kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktek).

Selanjutnya Lane mengemukakan bahwa konsep implementasi memiliki dua aspek, yaitu:

1. Hubungan antara tujuan (*objectivitas*) dan hasil (*outcome*), sisi tanggung jawab (*responsibility side*).
2. Proses untuk membawa kebijakan kedalam efek yang merupakan sisi kepercayaan (*trust side*).

Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014:23) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang mutlak harus ada, yaitu: 1). Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2). Adanya kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. 3). Adanya pelaksanaan (implementor) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan maupun pengawasan proses implementasi tersebut.

#### **4. Program**

##### **a. Pengertian**

Secara pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah

kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Seperti dikemukakan oleh Pariata Westra dkk (2000:67) program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaan. Siagian (2006:89) mengemukakan bahwa perumusan program kerja merupakan perincian dari pada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan.

Program penanggulangan kemiskinan dengan basis bantuan sosial yang merupakan hal baru di Indonesia adalah program pemberian bantuan dana bersyarat atau lebih dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang juga banyak diadopsi di berbagai Negara sebagai strategi program bantuan sosial.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan basis pemberian bantuan sosial yang ada setelah BLT adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan dana bersyarat. dimana program bantuan sosial dan perlindungan ditujukan untuk pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampingan dengan program Jamkesmas, Raskin, dan juga BSM (Bantuan Siswa Miskin). Secara konseptual Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. (<http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/> diakses pada 25 Juni 2017 pukul 20:48 WIB)

## **G. Definisi konseptual**

1. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing yang telah diberikan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD.
3. Kebijakan publik adalah kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan di masyarakat.
4. Program adalah perencanaan atau rencana untuk melakukan suatu kegiatan yang sudah di susun yang melibatkan sekelompok orang dalam waktu yang lama.
5. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin guna menurunkan angka Kemiskinan.

## **H. Definisi operasional**

Pengertian definisi oprasional menurut Koentjaraningra (1999:75) adalah suatu usaha mengubah konsep yang berupa konstrak dengan kata-kata yang menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat di uji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga penelitian ini benar-benar terarah dengan baik dan jelas.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai

misinya. Untuk organisasi pelayanan publik misalnya, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

1. Ada lima indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja menurut Dwiyanto, yaitu sebagai berikut:

a. Produktivitas

1) Indikator keberhasilan

2) Kinerja Dinas

b. Kualitas layanan

1) Sumber Daya Manusia

2) Komunikasi kepada masyarakat

c. Responsivitas

1) Kebutuhan masyarakat

2) Susunan Program

d. Resposibilitas

1) Capaian tujuan dari program

2) Sanksi atau melanggar aturan

e. Akuntabilitas

1) Evaluasi kegiatan

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja

1) Kemampuan

a. Pengetahuan tentang sejauh mana pemahaman terkait PKH

b. Cara penyampaian kepada masyarakat

2) Motivasi

- a. Pendorong atau penyemangat dalam melakukan pekerjaan

3) Lingkungan kerja

- a. Hubungan terhadap rekan kerja
- b. Hubungan terhadap masyarakat

## **I. Metode penelitian**

Menurut Subagyo (1997:2) suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode. Dalam penelitian ini peneliti akan mengupas secara mendalam mengenai kinerja dinas sosial dalam program keluarga harapan di kabupaten bantul tahun 2015-2016.

### **1. Jenis Penelitian**

Dr Agus Salim (2006:40) Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebenarnya menekankan pada proses, ini berarti, tatkala menghadapi fenomena yang memang dapat diukur, fenomena tersebut diteliti/diukur tidak secara ketat, sebagaimana dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi yang menyertainya.

Penelitian ini bermaksud ingin mencermati lebih jauh tentang Kinerja Dinas Sosial dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul tahun 2016. Maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalannya yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya.

Lexy J. Moloeng (1995:21) Penelitian kualitatif memiliki kegunaan antara lain untuk memahami interaksi sosial dan memahami perasaan orang yang sulit untuk dimengerti. Penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Pemilihan Dinas Sosial sebagai lokasi penelitian ini didasarkan atas keinginan untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Teknik Jenis Data**

#### a). Data Primer

Bagong Suyanto (2005:55) Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.

Menurut Lofland (1984:47) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Selain itu untuk memperkuat data hasil penelitian, maka peneliti juga melakukan wawancara. Peneliti menggunakan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana kinerja dinas sosial dalam Program Keluarga Harapan di Bantul.

#### b). Data sekunder

Bagong Suyanto dan Sutinah (2005:55-56) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro Pusat statistik, buku, jurnal dan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat kabupaten bantul tentang kinerja Dinas Sosial dalam Program Keluarga Harapan.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

##### **a. Dokumentasi**

Dengan mempelajari data yang mendukung penelitian yang diperoleh dengan menggunakan tehnik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literatur yang didapat dari, buku , jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara (interview) biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang lazim disebut responden dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yang mengandalkan data dari wawancara dengan informan, peranan informan, bukan responden, sangat penting sebab, data akan banyak di gali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai yang hendak di teliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup. Persoalan pertama dalam

teknik wawancara seperti ini adalah bagaimana memilih dan menentukan individu-individu dengan kualifikasi seperti ini. Maksudnya diperlukan informasi pangkal (key person) yang akan menjadi “pembuka pintu” dalam proses pengumpulan data. Informasi-informasi inilah yang akan menjadi informasi fokus (key informan).  
Bagong Suyanto dan Sutinah (2005:72)

Adapun daftar Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Ibu Rahayu Martiningtyas, SH ( Kepala Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial)
2. Ibu Lestari Dewi ( Ketua Kelompok RT. 12 Kecamatan Kasihan)
3. Bapak Ismanta ( Ketua Kelompok RT. 02 Kecamatan Kasihan)

## **5. Teknik analisis data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisa data untuk memberikan informasi dan dapat memberikan pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. Analisis kualitatif akan diperoleh data kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

### **a. Reduksi Data**

Dr. Agus Salim (2006:22) Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedekimian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat di tarik dan di verifikasi.

b. Penyajian Data

Dr. Agus Salim (2006:23) Merupakan suatu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan proses menganalisis dan menggabungkan informasi-informasi yang telah ada terorganisir secara terperinci untuk dapat dijadikan menjadi kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah proses pengambilan dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar.a